

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 30 TAHUN 2025****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme penegakan aturan penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara Negara kepada Komisi secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
14. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
15. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
16. Bukti Penerimaan adalah dokumen penyampaian SPT yang didalamnya memuat laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara selain wajib LHKPN.

17. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja Komisi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
  - d. Pejabat dan/ atau ASN dengan fungsi Strategis;
  - e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMD.
- (3) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pejabat struktural lainnya pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pejabat yang berada 1 (satu) level di bawah Direksi.
- (5) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pimpinan BUMD dengan tembusan kepada Inspektor.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
    - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
    - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara;
    - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
    - d. masih menjabat.
  - (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak :
    - a. saat pengangkatan pertama;
    - b. berakhirnya jabatan/pensiun; atau
    - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun,sebagai penyelenggara Negara.
  - (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
  - (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
  - (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan pada laman [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Verifikasi LHKPN dilakukan oleh Komisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi menyampaikan tanda terima melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara bahwa dokumen yang disampaikan lengkap.

- (3) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan belum lengkap, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (5) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari Komisi.
- (2) LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Komisi secara elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi.
- (4) Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunduh melalui laman [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

6. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

- (1) Dalam hal LHKPN yang dinyatakan lengkap dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketahui terdapat Harta Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi atau surat elektronik kepada Penyelenggara Negara untuk memperbaiki LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam laman resmi Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perbaikan LHKPN disampaikan Penyelenggara Negara.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Seluruh ASN selaku Wajib Pajak orang pribadi wajib mengisi dan melaporkan Harta Kekayaan termasuk pendapatannya berupa pelaporan SPT.
- (2) Tata cara penyampaian SPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti Penerimaan penyampaian SPT yang didalamnya memuat laporan Harta Kekayaan dapat diakui sebagai laporan Harta Kekayaan aparatur negara bagi ASN yang tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Bukti Penerimaan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Inspektorat dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

- (1) Komisi dapat memberikan akses laporan Harta Kekayaan kepada pengawas internal pada Pemerintah Daerah dan BUMD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah dan BUMD menyampaikan permohonan resmi kepada Komisi.
- (3) Setiap pengawas internal pada Pemerintah Daerah dan BUMD yang memperoleh akses Laporan Harta Kekayaan bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi atas pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal ASN terlambat dan/atau tidak melaporkan Harta Kekayaan melalui LHKPN dan/atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
  - a. terlambat melaporkan LHKPN;
  - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
  - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
  - d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
  - e. tidak melaporkan LHKPN,Komisi menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.
- (3) Keterlambatan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (4) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan partai politik atau majelis etik partai atau badan kehormatan DPRD untuk memberikan sanksi sesuai kode etik yang berlaku.

**Passal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Desember 2025

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

ttd

**AHMAD LUTHFI**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,**

ttd

**SUMARNO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Haerudin, S.H., M.H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 197007291996031001**